



LAPORAN SINGKAT **KOMISI I DPR RI**

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

Rapat ke	: 19 (tujuh belas)
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemkominfo RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI
Hari, Tanggal	: Senin, 16 Juli 2018
Pukul	: 10.55 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Asril Hamzah Tanjung, S.IP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Tindak lanjut hasil Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI tanggal 28 November 2017 mengenai dukungan PNBK sektor telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)
Hadir	: 1. ... orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI 2. a. Sekjen Kemkominfo RI, Sdri. Farida Dwi Cahyarini, MM Sekjen Kemkominfo RI, Sdri. Farida Dwi Cahyarini, MM b. Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, diwakili oleh Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sdri. Ir. Mariatul Aini, MBA c. Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI, Sdr. Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, Ph.D d. Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, diwakili oleh Direktur Kawasan Perkotaan Batas Negara, Sdr. Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemkominfo RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung, S.IP.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian PPN/Bappenas terkait penentuan lokasi prioritas 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang mencakup 28.196 desa di 385 Kabupaten/Kota dan kebutuhan akses bergerak seluler yang mencakup 7.666 desa di 270 Kabupaten/Kota prioritas. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendesak Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan redefinisi lokasi 3T dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan memasukkan akses data dalam kriteria IPD, sehingga setiap warga negara Indonesia mendapatkan keadilan akses telekomunikasi, data dan pelayanan bagi publik.
2. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas dan Kemkominfo serta kementerian terkait lainnya, untuk berkoordinasi membuat payung hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggunaan data wilayah *blank spot* sebagai penunjang kebijakan dalam pembangunan infrastruktur akses telekomunikasi dan akses data di wilayah NKRI yang masih *blank spot*.
3. Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, mencakup *voice*/suara maupun data, sehingga industri sektor telekomunikasi di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

Jakarta, 16 Juli 2018
KETUA RAPAT,

TTD.

Asril Hamzah Tanjung, S.IP
A-340